

## Digital Economy Working Group G20 Pada Masa Presidensi Indonesia Tahun 2022

Rizal Budi Santoso<sup>1</sup>, Achmad Alfaron Alamsyah<sup>2</sup>

Budi.santoso@widyatama.ac.id, alfaronalamsyah@gmail.com

<sup>1</sup>Program Studi Perdagangan Internasional, Universitas Widyatama

<sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

DOI: 10.33197/jpi.v1i1.1084

---

---

### Abstract (10pt, Bold, Multiple 1,15 space)

*This article aims to explain the digital economy working group of the G20 during the Indonesian Presidency in 2022. This article sees that this digital economy is one of the tools that the G20 can use to build resilience in world economic governance after the Covid-19 pandemic. In analyzing, this article uses the concepts of economic diplomacy and digital economy. The research method used in this research is a qualitative method supported by data collection through literature study and data reduction is also carried out in conducting data analysis. The results of this study indicate that there is an urgency in building governance of the global digital economy, especially after the pandemic crisis, discussion of this problem can be started by prioritizing common interests, especially the impact of the crisis on society and creating global economic resilience. As a country that tends to be in the middle, this can be an advantage for Indonesia in bridging G20 member countries.*

### Keywords

*Economy digital, G20, Indonesia*

### Corresponding Author

Rizal Budi Santoso  
Widyatama University  
Jl. Cikutra no 204 A Bandung  
West Java, Indonesia 40124

### Abstrak (10pt, Bold, Multiple 1,15 space)

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai *digital economy working group* G20 pada masa Presidensi Indonesia tahun 2022. Artikel ini melihat bahwa digital ekonomi ini merupakan salah satu alat yang dapat dimanfaatkan oleh G20 untuk membangun ketahanan tata kelola ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19. Dalam menganalisa, artikel ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi dan ekonomi digital. Metode riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga dilakukan reduksi data dalam melakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi dalam membangun tata kelola ekonomi digital global terutama setelah adanya krisis pandemi, pembahasan masalah tersebut dapat dimulai dengan mengedepankan kepentingan bersama, terutama dampak krisis terhadap masyarakat dan menciptakan ketahanan ekonomi global. Sebagai negara yang cenderung berada di tengah, hal ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam menjembatani negara-negara anggota G20.

---

---

## Pendahuluan

G20 adalah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara maju dan berkembang besar secara global. Forum ini terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat, sebagai serta Uni Eropa (World Economic Forum, 2016). Hal itu menyebabkan G20 memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis. Sebagai gambaran, pada tahun 2021, negara-negara yang tergabung dalam G20 akan berkontribusi terhadap 60% populasi dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% GDP dunia (G20, 2021a).

G20 dibentuk untuk membahas kebijakan guna mencapai stabilitas keuangan internasional. Dimulai pada tahun 1999 sebagai pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur

Bank Sentral, G20 telah berkembang menjadi pertemuan puncak tahunan yang melibatkan Kepala Negara dan Pemerintahan. Forum ini merupakan bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi perekonomian global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi yang sistemik.

Sembilan tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, para pemimpin negara G20 berkumpul untuk KTT G20 pertama. Dalam kesempatan itu, para pemimpin negara-negara tersebut mengkoordinasikan respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan sepakat untuk mengadakan pertemuan tahunan yang terus berlanjut hingga saat ini. Secara struktural, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Oleh karena itu, Presidensi G20, posisi dimana suatu negara menjadi tuan rumah pertemuan G20, dilakukan secara bergilir di antara negara-negara anggota. Agenda dan koordinasi kerja diselesaikan oleh perwakilan pemimpin G20 yang dikenal sebagai Sherpa, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Puncak dari kerja G20 di setiap siklusnya adalah komunike yang mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan, yang disusun dari rekomendasi terpilih dan hasil pertemuan tingkat menteri serta alur kerja lainnya.

Pengakuan akan pentingnya tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif di antara negara-negara ekonomi maju dan berkembang utama di seluruh dunia tetap menjadi tujuan utama G20. Pandemi global Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 harus diakui telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan perdagangan internasional. Pandemi telah meredefinisikan hubungan manusia dengan teknologi digital menjadi lebih multidimensi, seiring dengan semakin pentingnya layanan digital dalam kehidupan. Pandemi telah membuka mata kita akan peran penting teknologi digital, dan harus diakui telah menjadi akselerator pembentukan masyarakat digital. Salah satu tanda berkembangnya masyarakat digital adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital, yang menuntut karyawan, individu, dan sumber daya manusia dibekali dengan literasi dan keterampilan digital tingkat lanjut. Isu-isu digital kini tertanam dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dipicu oleh Pandemi, termasuk tantangan pertumbuhan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, dan budaya.

Salah satu poin penting yang menjadi landasan tumbuh dan berkembangnya masyarakat digital adalah konektivitas. Konektivitas berkaitan erat dengan transformasi digital yang lebih komprehensif dimana infrastruktur dan teknologi digital diterapkan dan dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan bersama yang ada, termasuk mendorong penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk kesehatan di masa pandemi. Konektivitas juga akan mengurangi kesenjangan digital dan memungkinkan jaringan manusia mempercepat aksi kolektif dan kolaborasi inklusif untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh pandemi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *Digital Economy Working Group* G20 Presidensi Indonesia telah banyak dilakukan dan didapati keterkaitan dengan artikel ini, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Øverby & Audestad (2021), menggambarkan bahwa dengan pesatnya perkembangan Internet dan ekonomi global yang semakin meningkat, konsep ekonomi digital menjadi semakin kaya dan relevan. Sheng (2022), menyatakan bahwa ekonomi digital mencakup semua sektor ekonomi yang informasinya dapat didigitalkan. Selanjutnya, pengertian barang dan jasa digital telah mencakup semua barang dan jasa yang dapat seluruhnya atau sebagian

disampaikan dalam format digital dan pengembangan, produksi, perdagangan, dan penyediaan semua barang dan jasa yang sangat bergantung pada teknologi digital.

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut mengembangkan ekonomi digitalnya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Prastyaningtyas et al. (2018), menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup baik yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia; peningkatan produktivitas, percepatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi; pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor serta mampu bertahannya perekonomian ditengah pandemi Covid-19. Permana & Puspitaningsih (2021), menyatakan bahwa ekonomi digital juga memberikan ancaman terhadap pertahanan negara yang mana digitalisasi menyebabkan seluruh data terkoneksi pada server yang rawan menimbulkan penyalanggunaan dan pemanfaatan data; transaksi yang tidak aman oleh serangan siber berbasis malware, transaksi penipuan maupun peretasan oleh hacker, dan kendala infrastruktur yang belum menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia. Bachtiar, Diningrat, Kusuma, Izzati, & Diandra (2020) Kumala (2022), mengkonsetrasikan kerangka pembangunan ekonomi digital yang inklusif dalam empat tangga yang meliputi aspek (i) jaringan internet dan infrastruktur pendukung, (ii) akses dan pemanfaatan internet, (iii) transformasi digital, dan (iv) jaminan sosial.

Penelitian selanjutnya adalah mengenai G20 dan pemanfaatannya oleh Indonesia seperti yang telah dideskripsikan oleh Wulandari (2010), yang menjelaskan bahwa pembentukan G20 oleh negara-negara maju dan berkembang ini adalah untuk mengatasi krisis finansial global dan tata kelola perekonomian dunia. Hermawan, Sriyuliani, Hardjowijono, & Tanaga (2011), menggambarkan bahwa G20 memiliki arti penting bagi Indonesia, keanggotaannya pada forum yang sangat memiliki prestise memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya, yang penting untuk mempromosikan kepentingan nasional vitalnya. Astuti & Fathun (2020), menjelaskan bahwa strategi diplomasi Indonesia yang diimplementasikan melalui rencana strategis nasional dalam forum G20 membentuk pola diplomasi ekonomi menyangkut perdagangan, komersial dan finansial. Ahmad Afandi & Feryanto (2022), memaparkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan Presidensi Indonesia dalam memimpin G20 untuk pembangunan agribisnis hijau dunia untuk mencapai dekarbonisasi Indonesia tahun 2060. Tobing, Nurhidayah, & Trinita (2022), G20 Presidensi Indonesia dengan tema “*Recover Stronger, Recover Together*” berupaya meningkatkan produktivitas masing-masing negara dengan lebih memperhatikan tenaga kerja, rumah tangga dan pertumbuhan jangka panjang guna menangkis dampak krisis yang berkepanjangan pasca pandemi Covid-19.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sekaligus menjadi kebaruan adalah Presidensi G20 merupakan momentum yang tepat dan harus dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia sebagai media untuk berperan sebagai jembatan pembangun dalam mengatasi kemampuan negara-negara mengatasi krisis yang sedang berlangsung untuk mengendalikan permasalahan yang dihadapi saat ini secara utuh. Memahami tantangan dan perlunya tindakan bersama, melalui fokus pada tiga pilar utama tersebut, Indonesia akan terus memimpin dan menjembatani dalam memastikan pemerataan akses vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi usaha mikro, kecil, dan usaha menengah (UMKM) dan ekonomi digital. Pada saat yang sama, mempertahankan aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas bersama untuk membantu berbagi di antara negara-

bangsa melalui upaya kerja sama internasional yang lebih kuat, lebih demokratis, dan representatif (G20, 2022).

Adapun artikel ini melihat bahwa digital ekonomi ini merupakan salah satu alat yang dapat dimanfaatkan oleh G20 untuk membangun ketahanan tata kelola ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19. Atas dasar tersebut, peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian “*bagaimana pelaksanaan digital ekonomi dibawah arahan Digital Economy Working Group G20 Presidensi Indonesia?*”

## **Kerangka Teoritis**

### **Diplomasi Ekonomi**

Diplomasi ekonomi adalah tentang penciptaan dan distribusi manfaat ekonomi dari hubungan ekonomi internasional. Jelas kepentingan nasional secara politik dan strategis akan menjadi faktor dalam negosiasi ekonomi, baik dalam hal mempromosikan tatanan dunia kapitalis yang liberal atau dalam memilih mitra negosiasi untuk perjanjian perdagangan. Kesimpulan dari perjanjian perdagangan atau ekonomi dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan lapangan kerja dan dengan demikian stabilitas politik di suatu negara (Woolcock & Bayne, 2012).

Namun sarananya tetap kesepakatan ekonomi, yang substansinya akan dibentuk oleh berbagai kepentingan sektoral domestik dan kepentingan lainnya. Dengan kata lain, tujuan politik tidak jarang menjadi faktor keputusan untuk memulai negosiasi, tetapi agenda konkrit, isi, dan pelaksanaan negosiasi akan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan kepentingan (Sabaruddin, 2017:6).

Alasan utama mengapa diplomasi ekonomi menjadi lebih penting adalah bahwa hubungan ekonomi internasional sendiri menjadi lebih penting dibandingkan dengan hubungan politik/keamanan, karena globalisasi menggantikan ketergantungan yang lebih besar (Setiawan, Sulastri, Aprianto, & Maulana, 2020:4). Globalisasi telah mengurangi kemampuan masing-masing negara bagian atau bahkan koalisi atau kelompok negara untuk membentuk hasil. Sebelum globalisasi dan munculnya tantangan seperti pemanasan global, dimungkinkan untuk membuat lebih banyak perbedaan antara tujuan ekonomi domestik dan perkembangan internasional. Saat ini semakin sulit bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan ekonomi domestik tanpa terlibat dalam negosiasi internasional yang ekstensif (Salsabilla Denura & Puspita Sari, 2021:9).

Diplomasi perdagangan, salah satu metode diplomasi ekonomi, memegang peranan penting dalam mengurangi hambatan perdagangan internasional. Terlepas dari adanya sistem perdagangan bebas yang telah mengurangi hambatan tarif ke level 0 atau hambatan non-tarif, pemerintah melakukan negosiasi secara bilateral, regional, dan plurilateral untuk mengurangi hambatan tarif ini ke level 0 atau hambatan non-tarif. Kuota impor, dumping, subsidi, standar teknis, dan undang-undang kesehatan adalah contoh hambatan non-tarif (Jemadu, 2015:7).

Diplomasi ekonomi menurut Woolcock & Bayne (2012), seperti bentuk-bentuk diplomasi lainnya, yang merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu:

1. *Decision-making* domestik
2. Negosiasi Internasional

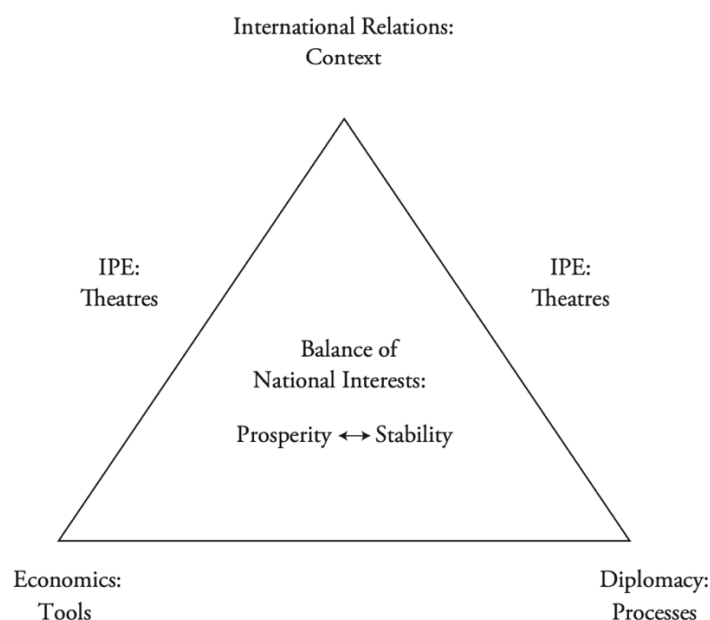
Proses *decision-making* secara domestik yang efisien sangat penting untuk mempersiapkan dan mendukung negosiasi internasional. Setelah negosiasi selesai, tingkat domestik masih

diperlukan untuk ratifikasi dan implementasi kesepakatan internasional yang dicapai. Dengan demikian dua tingkat berinteraksi satu sama lain terus-menerus.

Melengkapi proses diplomasi ekonomi tersebut, Okano-Heijmans (2011) memaparkan bahwa dalam membedakan berbagai untaian diplomasi ekonomi dan untuk mulai memahami hubungan antara, dan keragaman alat di dalam, untaian tersebut dapat diidentifikasi melalui empat dimensi penting dari diplomasi ekonomi, yaitu:

1. *The Context;*
2. *Tools;*
3. *Theatres;*
4. *Process*

Dimensi-dimensi ini menguraikan sudut analitis yang semuanya memberikan pemahaman yang lengkap tentang diplomasi ekonomi suatu negara — yaitu, bagaimana diplomasi ekonomi tertanam dalam mengejar keseimbangan kepentingan nasional, sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1 Kerangka analitis untuk studi tentang diplomasi ekonomi**

**Sumber: Okano-Heijmans (2011)**

Dalam rangka membangun keseimbangan kepentingan nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama diplomasi ekonomi, keempat dimensi ini berbeda satu sama lain, tetapi saling terkait dan melengkapi (kemakmuran dan stabilitas). Topik dan sasaran analisis dalam setiap dimensi diplomasi ekonomi adalah aktor-aktor dalam situasi tersebut. Keterkaitan antara unsur yang satu dengan yang lain bisa dalam berbagai arah; tidak selalu berurutan. Salah satu contoh keterhubungan adalah seperti sebuah negara (pembuat kebijakan) dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi internasional saat ini, terutama bagaimana posisi strategis negara dalam hubungan internasional (*context*); begitu negara menyadari konteks ini, ia akan dapat memilih alat (*tools*) diplomasi ekonomi yang paling efektif dan memilih mode praktik apa atau forum negosiasi mana yang akan diambil (*theatre*) yang kemudian bagaimana eksekusi dari diplomasi ekonomi tersebut dilakukan (*proses*).

Jika mengacu kepada kerangka analisis yang dikemukakan oleh Okano-Heijmans (2011) diatas dapat dilihat secara konteks, bahwa terdapat kepentingan nasional yang diupayakan oleh Indonesia untuk mengejar kemakmuran dan stabilitas dari *theatre* atau mode praktik hubungan internasional dalam kerangka kerja sama IK-CEPA harus berkualitas tinggi, saling menguntungkan, dan seluas-luasnya agar dapat menciptakan keseimbangan kepentingan nasional dari kedua negara. *Tools* dan proses dari diplomasi ekonomi Indonesia ini tertuang dalam perundingan kerja sama IK-CEPA yang harus mencakup perdagangan produk dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, dan sektor lainnya. Selain itu, harus sangat meningkatkan jumlah perdagangan dan investasi bilateral setinggi mungkin.

### **Ekonomi Digital Dalam Hubungan Internasional**

Ekonomi digital telah menjadi penting sejak awal era informasi. Ini telah menarik perhatian penelitian tentang pengaruhnya terhadap ekonomi umum, hubungan internasional, administrasi publik, dan politik. Namun, konsep “ekonomi digital” tetap ambigu. Istilah ini pertama kali diciptakan pada pertengahan abad ke-20 oleh Don Tapscott (1996) dalam bukunya yang populer tahun 1995, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Pada tahun yang sama, pendiri Laboratorium *Media Massachusetts Institute of Technology*, Nicholas Negroponte, menerbitkan sebuah buku berpengaruh berjudul *Being Digital*, di mana ekonomi digital digambarkan menggunakan "*bit*, bukan *atom*." Namun, dalam masa pertumbuhannya, konsep ekonomi digital terutama menyoroti relevansi ekonomi dari teknologi Internet yang muncul. Pemahaman tentang ekonomi digital telah berkembang secara signifikan sejak saat itu (Sheng, 2022:93).

Dengan pesatnya perkembangan Internet dan ekonomi global yang semakin meningkat, konsep ekonomi digital menjadi semakin kaya dan relevan. Brynjolfsson dan Kahin (2000) menyatakan bahwa ekonomi digital mencakup semua sektor ekonomi yang informasinya dapat didigitalkan. Selanjutnya, pengertian barang dan jasa digital telah mencakup semua barang dan jasa yang dapat seluruhnya atau sebagian disampaikan dalam format digital dan pengembangan, produksi, perdagangan, dan penyediaan semua barang dan jasa yang sangat bergantung pada teknologi digital. Sejak Krisis Keuangan Global tahun 2008, konten ekonomi digital terus berkembang untuk mencerminkan pembaruan teknologi digital yang cepat dan penerapan teknologi ini yang semakin dalam di masyarakat (Kling & Lamb, 2000:16). Ketika definisi ekonomi digital mulai melampaui e-commerce dan batas-batasnya kabur, berbagai kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh teknologi digital masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi digital.

Ada beberapa konsensus tentang definisi ekonomi digital yang digunakan oleh organisasi internasional dan di berbagai pertemuan puncak. Misalnya G20 *digital economy development and cooperation initiative* yang diadopsi oleh KTT G20 pada tahun 2016 mendefinisikan ekonomi digital sebagai serangkaian kegiatan ekonomi yang menggunakan pengetahuan dan informasi digital sebagai faktor kunci produksi, jaringan informasi modern sebagai pembawa penting, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kekuatan pendorong penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan struktur ekonomi. Ekonomi digital didefinisikan oleh Kamus Oxford sebagai "Ekonomi yang berfungsi terutama melalui teknologi digital, terutama transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan Internet." Ekonomi digital juga didefinisikan dalam kaitannya dengan model bisnis. Bukht dan Heeks menggambarkan

ekonomi digital sebagai “bagian dari hasil ekonomi yang semata-mata berasal atau terutama dari teknologi digital dengan model bisnis berdasarkan barang atau jasa digital.” Kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi digital didasarkan pada pengembangan, perdagangan, dan produksi barang dan jasa yang dapat didigitalkan dan itu mencakup model bisnis baru yang berfokus secara digital dan sektor ekonomi yang terutama berfokus pada atau dijalankan melalui Internet (Sheng, 2022:95).

Karena pentingnya ekonomi digital, menurut Yin dan Sheng (2021) implikasi perdagangan digital dan *e-commerce* telah dipertimbangkan kembali, dan prioritasnya di forum internasional telah meningkat. UNCTAD menggambarkan ekonomi digital memiliki tiga komponen penting: inti atau bagian dasar dari ekonomi digital, yang mencakup inovasi dasar (semikonduktor, prosesor, dll.), teknologi inti (komputer, peralatan telekomunikasi, dll.), dan infrastruktur lainnya; sektor TI, yang mencakup platform digital, aplikasi seluler, dan layanan pembayaran; dan sektor digital yang lebih luas, yang terutama mencakup berbagai industri, produk, dan layanan yang semakin terdigitalisasi. Digitalisasi barang dan jasa tradisional yang pernah mendominasi perdagangan dunia, seperti buku, musik, dan peralatan, menjadi tren utama dalam sistem perdagangan global. Ekonomi digital adalah bidang ekonomi yang tumbuh paling cepat dan telah mempercepat perubahan dalam perkembangan keuangan dan struktur industri di seluruh dunia dan menjadi kekuatan pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi secara global.

Dengan munculnya *smartphone*, teknologi mulai mendukung transmisi data digital dan transaksi digital dalam skala besar. Meluasnya penerapan teknologi pemosisian satelit ke perangkat lunak menyebabkan munculnya platform digital besar seperti Uber, Instagram, dan TikTok. Inovasi berkelanjutan dalam teknologi digital dan informasi, terutama mempopulerkan Internet seluler dan peningkatan besar dalam kecepatan akses, telah membuat konten ekonomi digital semakin melimpah dan beragam, dan industri baru terus bermunculan seputar teknologi digital. Sementara itu, beberapa perusahaan digital berbasis platform telah berkembang pesat di pasar, seperti Amazon, Facebook, Google, dan Alibaba. Pembentukan dan perkembangan pesat ekonomi digital merupakan hasil interaksi kemajuan teknologi di tingkat internasional dengan globalisasi ekonomi (Ciuriak, 2018:12). Keuntungan perdagangan digital, seperti pengurangan biaya transaksi dan tidak adanya kendala yang timbul dari lokasi dan pengiriman, telah meningkatkan volume perdagangan. Ekonomi digital juga menjanjikan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja serta membantu negara-negara berkembang dengan mengurangi kesulitan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi di pasar internasional (Ciuriak, 2020:7).

Singkatnya, meskipun ada beberapa variasi dalam interpretasi ekonomi digital, ada konsensus yang luas mengenai konsep tersebut. Inti dari ekonomi digital adalah teknologi digital, infrastruktur, dan solusi yang mendukung industri digital, dan terdapat kecenderungan menuju definisi ekonomi digital yang lebih luas daripada yang lebih sempit dan peningkatan fleksibilitas atas kontennya, sebagaimana layaknya kebutuhan akan perkembangan pesat dari sektor terkait.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik atau strategi pengumpulan dan analisis data mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik. Menurut Lamont (2015), metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami bagaimana kita memahami dunia di

sekitar kita, dan dengan demikian mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk politik internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada jurnal ilmiah, buku, laporan, media cetak dan publikasi data, dengan penelusuran berbasisan pada internet yang berkaitan dengan teori diplomasi publik dan data mengenai *pelaksanaan digital ekonomi dibawah arahan Digital Economy Working Group G20 Presidensi Indonesia*. Rentang waktu pengumpulan data dalam analisis penelitian adalah pada masa G20 Presidensi Indonesia pada tahun 2022. Metode triangulasi data digunakan untuk menilai validitas data yang dikumpulkan.

## Hasil dan Pembahasan

Aksi kolektif dan kolaborasi inklusif untuk mengatasi tantangan akibat Pandemi masih akan fokus pada Presidensi G20 saat ini. Ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia karena memegang kursi kepresidenan untuk pertama kalinya sejak G20 berdiri. Indonesia harus memanfaatkannya untuk memimpin dan melanjutkan Presidensi Italia 2021 yang menekankan aspek konektivitas dan inklusi sosial dengan menggarisbawahi perlunya konektivitas digital dengan pembangunan infrastruktur fisik. Melonjaknya penerapan teknologi dan platform digital telah menegaskan kebutuhan masyarakat digital untuk mendorong ekosistem digital yang lebih inklusif melalui keterampilan dan literasi digital. Oleh karena itu, Indonesia akan fokus agar digitalisasi berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan pertumbuhan yang berkelanjutan pascapandemi.

Indonesia resmi menyelenggarakan Presidensi G20 selama setahun penuh, sejak 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Seperti disebutkan secara singkat di atas, Kepresidenan G20 dirotasi setiap tahun di antara para anggotanya. Negara yang memegang Kepresidenan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya yang dikenal sebagai Troika untuk memastikan kelangsungan agenda. Italia, Indonesia, dan India saat ini menjadi bagian dari Troika (G20, 2021a). Oleh karena itu, Kepresidenan Indonesia yang mengusung tema “Pulihkan Bersama, Pulih Lebih Kuat” akan melanjutkan agenda Kepresidenan Italia dengan mendorong upaya bersama mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global pasca Pandemi Covid-19 secara inklusif yang berfokus pada tiga isu prioritas utama, yaitu: (i) kesehatan; (ii) digitalisasi; dan (iii) transisi energi (Triantoro, 2022). Kepresidenan G20 Indonesia akan mendorong anggota G20 untuk secara aktif berkontribusi dalam serangkaian diskusi kebijakan untuk memfasilitasi kewirausahaan digital, mengurangi kesenjangan literasi digital, dan operasionalisasi praktis aliran data dan kerangka berbagi data.

Presidensi G20 merupakan momentum yang tepat dan harus dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia sebagai media untuk berperan sebagai jembatan pembangun dalam mengatasi kemampuan negara-negara mengatasi krisis yang sedang berlangsung untuk mengendalikan permasalahan yang dihadapi saat ini secara utuh. Memahami tantangan dan perlunya tindakan bersama, melalui fokus pada tiga pilar utama tersebut, Indonesia akan terus memimpin dan menjembatani dalam memastikan pemerataan akses vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi digital. Pada saat yang sama, mempertahankan aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas bersama untuk membantu berbagi



di antara negara-bangsa melalui upaya kerja sama internasional yang lebih kuat, lebih demokratis, dan representatif (G20, 2022).

Melanjutkan komitmen dalam G20 Digital Ministers' Declaration dan G20 *Rome Leaders' Summit Declaration* di bawah Kepresidenan Italia, Presiden Indonesia akan meminta *Digital Economy Task Force* (DETF) berubah menjadi *Digital Economy Working Group* (DEWG). Menggarisbawahi peran penting ekonomi digital dalam banyak aspek kehidupan, DEWG bertujuan untuk merampingkan masalah digital di seluruh Kelompok Kerja, Satuan Tugas, dan Kelompok Keterlibatan sambil mendukung kolaborasi dan dialog lintas sektor. DEWG beroperasi berdasarkan Kerangka Acuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 yang diadopsi pada tahun 2021. Sebagai Kelompok Kerja, Kepresidenan Indonesia akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya untuk membahas bagaimana digitalisasi menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih signifikan, memastikan ekonomi digital yang berkelanjutan, dan mengenali tantangan ekonomi digital. digitalisasi saat ini.

Agenda DEWG G20 2022 akan terdiri dari rangkaian diskusi kebijakan, forum multi-stakeholder, dan workshop terkait 3 topik besar: *Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills & Digital Literacy, dan Cross Border Data Flow (CBDF) & Data Free Flow with Trust (DFFT)* (Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2022). Isu-isu ini diangkat untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan dengan fokus dan hasil dari prioritas DETF G20 sebelumnya. Salah satu isu tersebut adalah konektivitas digital yang banyak dibahas di DETF dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, konektivitas dan inklusi sosial dengan menggarisbawahi perlunya konektivitas digital dengan pembangunan infrastruktur pada masa Kepresidenan Italia perlu terus dikembangkan oleh Indonesia agar anggota G20 mengenali konektivitas digital sebagai interaksi antara konektivitas fisik dan manusia. Indonesia juga dapat memainkan peran pembangun jembatan di sini dengan membahas persamaan dan perbedaan pandangan antara anggota G20 tentang CBDF dan DFFT. Dalam Presidensi Saudi dan Italia sebelumnya, Indonesia mengedepankan empat prinsip dengan CBDF dan DFFT: *legalness, fairness, transparansi, dan resiprositas*. Dalam konteks ini, Indonesia dapat secara konsisten mendorong penerapan prinsip-prinsip umum CBDF dan DFFT di antara anggota G20.

Isu keterampilan digital dan literasi digital, khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi, secara konsisten dibahas di G20 sejak 2017 dan juga dianggap sebagai elemen penting dalam Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Elemen lain yang tidak kalah penting dan menjadi fokus adalah pilar transformasi ekonomi berbasis digital, yaitu ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital yang berdiri di atas infrastruktur digital. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa literasi digital dan keterampilan digital yang lebih tinggi dapat menutup kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi digital. Dalam kaitan ini, Presidensi G20 Indonesia melihat pentingnya memiliki landasan yang jelas, konkrit, dan nyata untuk mengembangkan keterampilan digital dan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi digital. Pada titik ini, peran Indonesia sebagai pembangun jembatan juga harus ditekankan untuk mengadakan diskusi lebih lanjut tentang akses ke teknologi digital canggih, di mana partisipasi yang berarti dari kelompok rentan sangat penting dan mendasar. Ini termasuk memastikan digitalisasi berkelanjutan yang dapat mengatasi tantangan lain seperti defisit kepercayaan, persaingan, dan krisis multilateralisme dengan berfokus pada masalah investasi dan pendanaan; kerjasama usaha patungan; kerja sama alih teknologi; program peningkatan kapasitas; dan hibah (Triantoro, 2022).

## **Posisi Indonesia Pada G20 DEWG**

Peran G20 cukup signifikan dalam dinamika dunia global. Beberapa peran nyata yang dapat dilihat adalah perannya dalam penanganan krisis keuangan global tahun 2008, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tahun 2015, penanganan pandemi Covid-19, dan isu lainnya seperti perdagangan, perubahan iklim, dan pembangunan. . Ada tiga acara utama G20, termasuk KTT, pertemuan menteri dan wakil, dan kelompok kerja (Bank Indonesia, 2022).

Tahun 2022 akan menjadi momen mewah bagi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi presiden G20. Fungsi kepresidenan Indonesia ini ditetapkan pada KTT Riyadh 2020, di mana serah terima jabatan presiden dilakukan pada akhir KTT kepresidenan Italia di Roma pada 30-31 Oktober 2021. Momen kepresidenan ini bisa dimanfaatkan Indonesia. untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan meningkatkan posisi Indonesia dalam dinamika politik internasional melalui kepemimpinan Indonesia di G20.

Indonesia juga perlu memanfaatkan momen ini untuk mencapai kepentingan nasional sebesar-besarnya dengan menyesuaikan posisi Indonesia dengan lanskap ekonomi digital Indonesia, khususnya kebijakan ekonomi digital yang dibawa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini. Indonesia juga perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut akan menguntungkan rakyat Indonesia dan bagaimana negara lain dapat mengadopsi kebijakan tersebut.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam transformasi digital Indonesia menuju Visi Indonesia 2045, diperlukan optimalisasi informasi dan data dengan mensinergikan pelaku usaha, ilmuwan, peneliti, mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan ekonomi digital dalam menentukan isu-isu lanjutan yang akan dibawa ke forum . Perlu diperhatikan bahwa meskipun secara statistik Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-15 secara global, Indonesia harus tetap diakui sebagai negara berkembang (Research FDI, 2021). Indonesia juga dapat menggunakan momentum tersebut untuk menempatkan Indonesia sebagai jembatan yang menyuarakan kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Secara konkret, dalam Roadmap Indonesia Digital 2021-2024, Indonesia bertujuan untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital dengan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1%, mendigitalkan UMKM hingga mencapai 50%, menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru, dan melatih 600 ribu talenta digital baru setiap tahun. . Hal-hal tersebut diharapkan dapat menciptakan infrastruktur ekonomi digital baru, terutama technology enabler seperti drone dan robot, crewless car, 3D printing, artificial intelligence, big data analysis, cloud computing, dan teknologi lainnya (Hartanto, 2021).

Dalam memperkuat kepercayaan di antara negara-negara G20, Indonesia harus memastikan bahwa setiap hasil dinarasikan senyaman mungkin. Ini mencakup dua hal. Pertama, meski Indonesia menggunakan momentum ini untuk mencapai kepentingan nasional, namun isu yang diangkat harus menarik dan memberikan manfaat yang besar bagi negara G20 lainnya. Kedua, Indonesia harus memastikan tidak akan mengangkat isu-isu yang dapat menyinggung hubungan bilateral atau multilateral atau konflik dengan anggota lain, seperti isu-isu sensitif yang mempengaruhi interaksi antara China dan Amerika Serikat. Indonesia juga harus fokus membangun inklusivitas global untuk bekerja bahu membahu dan saling mendukung untuk pulih

dari pandemi Covid-19. Akhirnya, hasilnya harus menginspirasi organisasi internasional dengan memberikan hasil di tingkat kebijakan dan bahkan lebih tinggi lagi di tingkat tindakan strategis.

Kepresidenan Indonesia harus fokus pada infrastruktur digital; bagaimana perencanaan, pembiayaan, dan peluang investasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah global. Beberapa hal yang perlu digaribawahi adalah:

- a. Pandemi Covid-19 telah menciptakan ekosistem baru, khususnya ekosistem digital. Telah terjadi lonjakan ekonomi digital dalam dua tahun terakhir (kuantum digital)
- b. Infrastruktur digital adalah irisan antara teknologi, kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial. Keempat irisan tersebut dapat dijadikan variabel untuk menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur digital Indonesia lebih unggul dan mampu memimpin G20
- c. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman tertentu. ITU, UNCTAD, UNIDO dan OI lainnya dapat digunakan sebagai mitra pengetahuan untuk mengukur apa dan sejauh mana upaya Indonesia dapat dilakukan. Misalnya, ITU bersedia membantu masalah prioritas pertama untuk mempercepat transformasi digital dalam dukungan platform, fasilitasi forum internasional, dan pembentukan platform keamanan siber.
- d. Kisah sukses infrastruktur digital Indonesia perlu ditunjukkan untuk mengangkat posisi Indonesia: satelit, Palapa Ring, akses internet broadband, dan jaringan 4G Indonesia yang hampir lengkap. Pembangunan akses jaringan 4G masih terus dilakukan untuk melayani beberapa desa yang belum terlayani. Ditargetkan akhir tahun 2022 seluruh desa di Indonesia sudah terlayani sinyal 4G. Berdasarkan data terakhir, 12.548 desa belum terlayani hingga akhir tahun 2019. BAKTI berkomitmen membangun jaringan 4G di wilayah 3T sebanyak 9.113 desa dan operator seluler membangun di wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa. Kisah ini harus diangkat dan diarahkan untuk meningkatkan investasi karena biaya pengembangannya cukup besar.

Selain itu, transformasi digital tidak terbatas pada infrastruktur digital saja. Selanjutnya, dalam konteks konektivitas, Indonesia perlu membangun transformasi digital yang lebih komprehensif terkait bagaimana infrastruktur digital diterapkan dan bagaimana keberadaan teknologi ini relevan dengan aspek ekonomi digital masyarakat global, khususnya komunitas “*Global South*”.

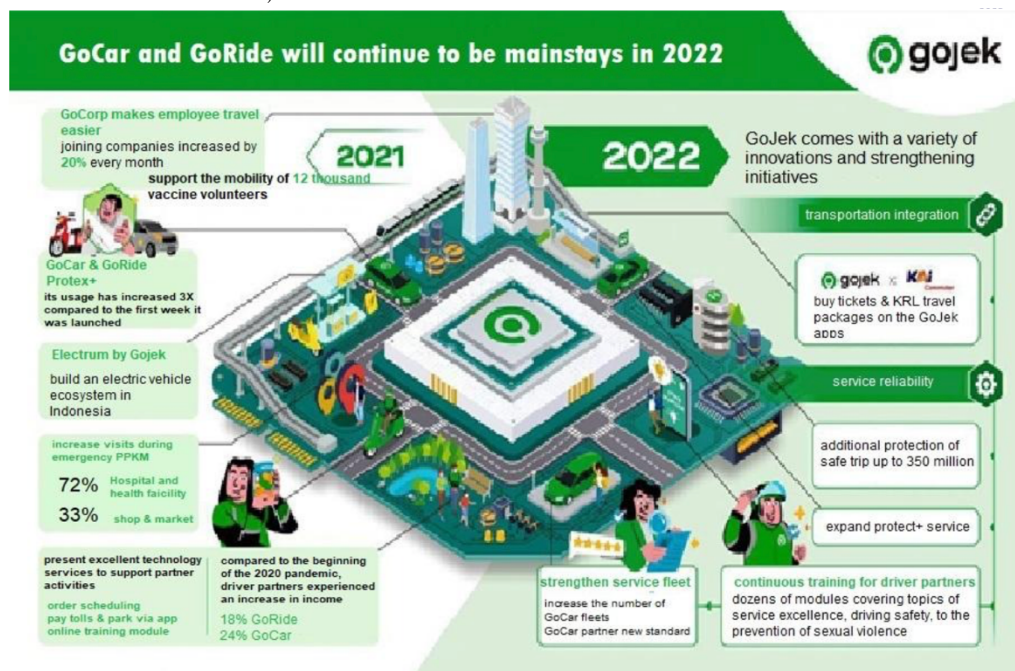
Untuk merangkul semua negara, terutama negara berkembang, Indonesia perlu mengatasi masalah kesenjangan digital dengan menekankan bahwa tidak ada sektor pelaku ekonomi yang terpinggirkan. Untuk membentuk upaya yang komprehensif dan koheren, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang melibatkan lima jenis pelaku ekonomi utama: rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan internasional. Artinya, strategi yang ditawarkan Indonesia kepada forum diupayakan bersifat mikro dan makro sekaligus. Solusi yang dapat ditempuh untuk mencapai transformasi digital adalah mendesain ulang tata kelola ekonomi global melalui teknologi digital. Transformasi digital adalah perubahan pola dan daya pikir masyarakat global karena teknologi yang canggih tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna yang tidak memiliki literasi digital yang mumpuni. Dalam konteks yang lebih implementatif, solusi ini terdiri dari beberapa upaya lintas sektor, antara lain (G20 Indonesia 2022, 2022):

1. Digitalisasi ekonomi

2. Penguatan UMKM
3. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
4. Perwujudan ekonomi kreatif
5. Pengembangan SDM
6. Pemulihan ekonomi
7. Transisi terukur terkait akses ke teknologi dan keuangan.

Ketujuh upaya yang disorot mengacu pada peningkatan literasi digital melalui kebijakan yang memfasilitasi transformasi ekonomi digital. Untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global, Indonesia perlu menempatkan segmen yang paling signifikan dalam deklarasi masyarakat, bukan teknologi atau regulasi. Artinya, berbagai narasi yang dibawa ke dalam forum harus berbicara tentang bagaimana segmen masyarakat yang terpinggirkan dapat masuk ke dalam ekosistem baru untuk memberikan manfaat penuh bagi kepentingan nasional dan tata kelola ekonomi global.

Untuk meningkatkan posisi strategisnya, Indonesia juga perlu membawa kisah sukses dari ekonomi kreatif yang bertahan dan sukses di masa pandemi. Pelaku ekonomi yang bertransformasi menjadi unicorn seperti Grab, Bukalapak, Tokopedia, dan BUMN perlu menjadi contoh di G20. Misalnya, di masa pandemi, Gojek terus meluncurkan inovasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Pada tiga layanan utama yaitu transportasi, pesan antar makanan, dan logistik, Gojek memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap PDB Indonesia atau sekitar dua ratus empat puluh sembilan triliun rupiah dari Januari-Oktober 2021 atau meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Kesuksesan Gojek dalam berinovasi juga berdampak positif terhadap loyalitas konsumen, dimana 86% pelanggan terus menggunakan platform ini tanpa promo (IndoTelko, 2021). Infografis di bawah ini merupakan layanan yang menjadi inovasi andalan Gojek di tahun 2022.



Gambar 2. Layanan Andalan Utama Gojek di 2022

Sumber: Media Indonesia (2022)

Selain transportasi, jasa pengiriman makanan, dan logistik, Indonesia juga mengalami transformasi digital di bidang kesehatan. Beberapa bisnis rintisan seperti Halodoc berhasil melahirkan inovasi yang memudahkan para pelaku usaha kecil dan mikro di bidang apotek, pelayanan farmasi, dokter, fasilitas kesehatan, dan pelaku usaha di bidang kesehatan untuk bertemu dengan masyarakat secara cepat dan mudah. Beberapa inovasi Halodoc yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia di masa pandemi terangkum dalam tabel di bawah ini.

Inovasi	Deskripsi
Tes	Pelopor tes drive-thru covid-19
Pelacakan	Telehealth pertama yang menghubungkan hasil covid-19 dengan Peduli Lindungi
Vaksinasi	Tersebar di delapan provinsi
Perawatan	Bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pasien isolasi mandiri mendapatkan obat-obatan gratis
Memelihara	Mengoperasikan Rumah Oksigen berdasarkan kerjasama
Handling	Menggagas gerakan Oksigen untuk Indonesia
Accompaniment	Rilis halaman khusus untuk psikologi dan kesehatan hewan

**Tabel 1. Inovasi Halodoc Saat Pandemi**

Sumber: Putra & Gunawan (2021)

Meski tidak bisa dipungkiri penetrasi ekonomi digital sangat terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga bisa menjadi tantangan untuk menjangkau jaringan usaha kecil dan mikro yang lebih luas terutama di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, isu pentingnya adalah bagaimana upaya digitalisasi di Indonesia dapat seinklusif mungkin dimana platform digital dapat digunakan tidak hanya oleh industri besar tetapi juga industri kecil dan mikro.

Ada beberapa kekhawatiran dan keterbatasan dalam memperkuat posisi Indonesia di forum tersebut:

1. Indonesia harus mampu mengolah data dan informasi sedemikian rupa sehingga data dan informasi tidak hanya terintegrasi tetapi juga saling berinteraksi. Indonesia harus mampu memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi data di era transformasi digital.
2. Indonesia perlu membangun jaringan kebijakan yang memiliki standar mutu dan pemerataan sehingga dapat digunakan secara global dan diterima oleh mayoritas negara. Artinya, Indonesia memberikan rekomendasi regulasi yang mampu menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat global serta tidak sensitif terhadap negara tertentu.
3. Ketertarikan Indonesia terhadap konektivitas dan transformasi digital dapat dilihat dalam “roadmap Indonesia Digital 2021-2024”. Roadmap tersebut memuat empat sektor strategis yang harus diperhatikan dan diselaraskan, antara lain infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
4. Membangun tata kelola ekonomi digital global diperlukan. Saat ini, apalagi mengingat krisis pandemi, pembahasan masalah tersebut dapat dimulai dengan mengedepankan kepentingan bersama, terutama dampak krisis terhadap masyarakat dan menciptakan ketahanan ekonomi global. Sebagai negara yang cenderung berada di tengah, hal ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam menjembatani negara-negara anggota G20.

5. Forum harus menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konkrit dan terukur serta berkelanjutan sehingga dapat dilanjutkan oleh presiden berikutnya.
6. Terakhir, beberapa kluster dapat dimasukkan dalam komitmen politik dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam "Jalan Maju" dalam Deklarasi Menteri. Kluster tersebut antara lain:
  - a. Infrastruktur digital menghubungkan dan menghubungkan teknologi fisik dan virtual seperti komputasi, penyimpanan, jaringan, aplikasi, dll
  - b. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan media digital dan teknologi komunikasi untuk menemukan, mengidentifikasi, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi, yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis.
  - c. Kebijakan digital meliputi pengaturan komunikasi digital dan elektronik, keamanan jaringan dan informasi, kebijakan frekuensi, dan isu-isu terkait akses broadband dan infrastruktur digital
  - d. Kesenjangan digital adalah kesenjangan yang ada antara individu atau komunitas yang memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi modern dan mereka yang tidak memiliki akses
  - e. Aspek kebijakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama internasional dapat menjembatani kesenjangan digital yang terjadi, khususnya di antara negara-negara G20
  - f. Ekosistem digital adalah jaringan kompleks yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dengan masyarakat umum yang terhubung secara online dan berinteraksi secara digital untuk menciptakan nilai bagi semua
  - g. Kewirausahaan digital adalah kepedulian tentang bagaimana melibatkan, menghasilkan, dan mempromosikan UMKM dalam ekonomi digital
  - h. Program peningkatan kapasitas dengan fokus pada setiap program yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berbasis transformasi digital yang terlihat akan dimunculkan pada rangkaian pertemuan G20
  - i. Tanggung jawab digital, yang juga bisa dijadikan jargon, adalah tanggung jawab negara-negara G20 sebagai garda terdepan untuk membawa perubahan global dalam pembangunan ekonomi berbasis transformasi digital. Dengan demikian, G20 dapat berperan sebagai reaktivasi aktor ke negara lain
  - j. Inklusi digital adalah kemampuan masyarakat untuk menikmati manfaat online dan menggunakan teknologi digital dengan percaya diri untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka

## Kesimpulan

DEWG G20 adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk membahas masalah ekonomi digital dan teknologi informasi di negara-negara G20. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mengembangkan kebijakan ekonomi digital dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Indonesia memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan digital di masa depan, terutama karena negara ini memiliki populasi yang besar dan semakin terkoneksi secara digital. Selain itu,

Indonesia juga memiliki banyak perusahaan teknologi yang berkembang pesat, seperti Gojek dan Tokopedia, yang dapat menjadi pemain penting dalam pasar global teknologi. Sebagai tuan rumah presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin diskusi dan memperkuat kerja sama internasional dalam mengembangkan kebijakan dan infrastruktur teknologi informasi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, DEWG G20 dapat menjadi forum penting untuk mengatasi masalah ekonomi digital dan teknologi informasi yang relevan bagi Indonesia dan negara-negara anggota G20 lainnya.

### Referensi/ References (12pt, Bold)

- Ahmad Afandi, F., & Feryanto, F. (2022). Pemanfaatan Presidensi Indonesia Dalam G20 Untuk Pembangunan Agribisnis Hijau Dalam Mencapai Dekarbonisasi Indonesia 2060. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(3), 1–7. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.2>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. Al, & Diandra, A. (2020). Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia. In *Smeru Research Institute*. Retrieved from <https://smeru.or.id/id/publication-id/ekonomi-digital-untuk-siapa-menuju-ekonomi-digital-yang-inklusif-di-indonesia>
- Bank Indonesia. (2022). G20 Presidency of Indonesia 2022.
- Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (2000). *Understanding the digital economy: Data, tools, and research*. Massachusetts: MIT Press.
- Ciuriak, D. (2018). Digital Trade Is Data Treaty-Ready? *CIGI Papers*, (162).
- Ciuriak, D. (2020). Digital Trade in a Post-Pandemic Data-Driven Economy. *SSRN Electronic Journal*, (May), 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3617251>
- G20. (2021a). About G20.
- G20. (2022). G20 Presidency of Indonesia.
- G20 Indonesia 2022. (2022). *Presidensi G20 Indonesia: Recover Together Recover Stronger* (1st ed.). Jakarta: G20 Indonesia 2022.
- Hartanto, A. (2021). Menko Airlangga: Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia, Tidak Hanya Target Pasar Tapi Harus Jadi Pemain Global. Retrieved February 16, 2022, from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3433/menko-airlangga-pengembangan-ekonomi-digital-di-indonesia-tidak-hanya-target-pasar-tapi-harus-jadi-pemain-global>
- Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H., & Tanaga, S. (2011). *Peran Indonesia Dalam G-20: Latar Belakang, Peran, dan Tujuan Keanggotaan Indonesia*.
- IndoTelko. (2021). Gojek Dorong Inovasi di Tiga Layanan Utama. Retrieved January 26, 2022, from Digital Business website: <https://www.indotelko.com/read/1635513936/gojek-dorong-inovasi-di-tiga-layanan-utama>
- Jemadu, A. (2015). Diplomasi Ekonomi Indonesia: Menuju Solusi yang Lebih Komprehensif. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 30(2).

- Kementerian Komunikasi Dan Informatika. (2022). G20 Digital Economy Working Group (DEWG): Issue Note. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Presidensi Indonesia G20 - 2022, Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional.
- Kling, R., & Lamb, R. (2000). IT and organizational change in digital economies. In *Understanding the digital economy*. Massachusetts: MIT Press.
- Kumala, S. L. (2022). Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i2.190>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*. London: Sage Publications Ltd.
- Media Indonesia. (2022). Mobilitas Bangkit dari Pandemi, Gojek Siap Jawab Kebutuhan Transportasi Masa Depan di 2022. Retrieved January 26, 2022, from Ekonomi website: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465597/mobilitas-bangkit-dari-pandemi-gojek-siap-jawab-kebutuhan-transportasi-masa-depan-di-2022>
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. In A. G. van Bergeijk, Peter, M. Okano-Heijmans, & J. Melissen (Eds.), *Economic Diplomacy, Economic and Political Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Øverby, H., & Audestad, J. A. (2021). *Introduction to Digital Economics*. Retrieved from <https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-78237-5>
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>
- Putra, T., & Gunawan, A. (2021). Halodoc, Atasi Pandemi di Garda Depan.
- Prastyaningtyas, E. W., Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., Saragih, H. J. R., Pertahanan, E., Pertahanan, F. M., ... Suryaningtyas, C. D. (2018). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia the Development of Indonesia ' S Digital Economy. *Jurnal Lentera Bisnis*, 1(2), 245–259. Retrieved from <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8375>
- Research FDI. (2021). The Top 20 Largest Economies In The World By GDP.
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Salsabilla Denura, J., & Puspita Sari, V. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 212–227. <https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.31172.33468>
- Setiawan, A., Sulastri, E., Aprianto, E., & Maulana, I. (2020). Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Asia Tengah. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ 7 Oktober 2020*. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/8866/5212>
- Sheng, L. (2022). *Big Tech Firms and International Relations*. Singapore: Springer International Publishing.
- Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. Hill: McGraw.
- Tobing, G. K. M., Nurhidayah, P. R., & Trinita, B. A. (2022). Dampak Presidensi G20 Terhadap Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Frequency of International Relations*, 3(2), 134–153.



- Triantoro, A. Y. (2022). *Diplomasi Indonesia di G20 dalam mendukung Ekonomi Digital*. Jakarta.
- Woolcock, S., & Bayne, N. (2012). Economy Diplomacy. In A. F. . Cooper, J. Heine, & R. Thakur (Eds.), *The oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Wulandari, P. (2010). G20 dan Krisis Finansial Global. *Jurnal Isip*, (1), 49–56.
- Yin, Y., & Sheng, L. (2021). Theorizing about global imbalances: An inequality perspective. *Argumenta Oeconomica*, 46(1), 169–181.